

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU PETANI
BERJAYA(E-KPB) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DAYA MURNI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

Muhammad Ardi Kurniawan

NPM : 1931040120



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU PETANI
BERJAYA(E-KPB) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA DAYA MURNI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama



Pembimbing I : Tin Amalia Fitri, M.SI
Pembimbing II : Angga Natalia, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) merupakan kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi lampung, berbasis teknologi informasi. Adanya e-KPB ini dapat memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan benih atau bibit, pupuk, obat-obatan secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan para petani dalam kapasitas pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani.

e-KPB berfokus pada permodalan para petani, dengan tujuan guna mengetahui implementasi dari diterapkannya program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dalam upaya mensejahterakan petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) responden, dengan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang memiliki empat indikator yaitu Disposisi, Komunikasi, sumber daya manusia, dan birokrasi. Adapun hasil analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam rangka mewujudkan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian diperlukan jaminan pendukung tersedianya sarana produksi pertanian, hal tersebutlah yang dibutuhkan oleh warga terutama dibidang pengelolaan pertanian, akses pembiayaan, pembinaan manajemen tani dan bantuan sosial lainnya. Hasil penelitian diambil melalui wawancara dengan beberapa warga daerah Kabupaten Tulang bawang barat dimana pelaksanaan program asuransi e-KPB tersebut sudah terlaksanakan didukung dengan adanya sumberdaya alam yang menjadi faktor utama terlaksananya kebijakan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan Publik, E-KPB, Kesejahteraan Petani.

ABSTRACT

Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) is an electronic farmer identity card issued by the regional government of Lampung Province which is based on information technology. The existence of e-KPB can provide guarantees to farmers to get seeds or seedlings, fertilizer, medicines in a timely manner according to farmers' needs in the market capacity of agricultural products at prices that are profitable for farmers.

e-KPB focuses on farmer capital, with the aim of knowing the implementation Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) program in an effort to improve the welfare of farmers. This research uses public policy theory, the public policy indicators are communication, resources, bureaucratic structure and disposition. This type of research uses field research (field research) which is qualitative descriptive research. This research uses Edward III's theory which has four indicators, namely Disposition, Communication, human resources, and bureaucracy. The data collection technique for this research is observation, interviews and documentation.

This research uses a field research method (Field Research) of respondents, with a qualitative descriptive type. The results of data analysis use data reduction, data presentation and drawing conclusions. In order to realize the economic strength of an agricultural-based community, guarantees to support the availability of agricultural production facilities are needed, this is what residents need, especially in the areas of agricultural management, access to financing, agricultural management development and other social assistance. The results of the research were taken through interviews with several residents of the West Tulang Bawang Regency area where the implementation of the e-KPB insurance program has been implemented, supported by the existence of natural resources which are the main factor in implementing the policy well.

Keywords : Implementation of public policy, E-KPB, Farmer Welfare.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ardi Kurniawan
NPM : 1931040120
Jurusan / Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU PETANI BERJAYA (e-KPB) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI STUDI KASUS DESA DAYAMURNI KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun pikiran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila sewaktu waktu terbukti terdapat penyimpangan, duplikat, tiruan atau plagiat pada karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagai mana mestinya.

Bandar Lampung, 21 Mei 2024



Muhammad Ardi Kurniawan
Npm. 1931040120



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Program Elektronik Kartu Petani
Berjaya (e-KPB) Dalam Upaya Mewujudkan
Kesejahteraan Petani di Desa Dayamurni
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang
Bawang Barat**
Nama : M. Ardi Kurniawan
NPM : 1931040120
Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Tin Amalia Fitri, M.Si.
NIP : 197801302011012004

Angga Natalia, M.I.P.
NIP : 198912122023212073

Mengetahui
Kaprodi Pemikiran Politik Islam

Abd. Oohar, M.Si.
NIP : 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratman Sukarame Bandar Lampung. Telp:(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”** disusun oleh: **M Ardi Kurniawan, NPM. 1931040120, Program Studi Pemikiran Politik Islam.** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung pada **Hari/Tanggal: Jum'at, 21 Juni 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag

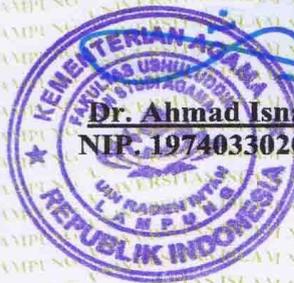
Sekretaris : Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb.,M.Kes (...)

Penguji Utama : Abd. Qohar, M.Si

Penguji Pendamping I : Tin Amalia Fitri, M.Si.

Penguji Pendamping II : Angga Natalia, M.I.P

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Dr. Ahmad Isnaeni, M.A
NIP. 197403302000031001**

MOTTO

خَوْفٍ مِّنْ وَقَامَنَّهُمْ جُوعٍ مِّنْ أَطْعَمَهُمُ الَّذِي

Artinya : “yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”

(Q.S. Quraisy : 4)



PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin dengan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada Allah SWT dan selalu senantiasa memberikan nikmat-Nya, sehingga menjadikan aku insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu dan beriman kepada-Nya. Dengan mengucapkan lafal bismillah, skripsi ini akan aku persembahkan untuk orang yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama peneliti menimba ilmu, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua ku Ayah dan Bunda tersayang, Bapak Malik dan Ibu Karnida Sari yang telah sangat berjasa dikehidupan aku, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, doa, pengorbanan, jerih payah serta dukungan, nasihat yang selalu diberikan hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan resek dan keberkahan umur dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
2. Adik-adik tersayang, Angga Ramadhan dan Adam Dharma Putra yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Prodi Pemikiran Politik Islam yang dimana tempat peneliti menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama Muhammad Ardi Kurniawan yang lahir pada 02 Oktober tahun 2000 di Daya Murni kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Malik dan ibu Karnida Sari. Peneliti mulai menempuh Pendidikan pada tahun 2007 di SD N 02 Daya Murni, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Tumi Jajar pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA N 1 Tumi Jajar pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada program studi Pemikiran Politik Islam. Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka peneliti Menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya(E-Kpb) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani Di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”** semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 2024

Penulis

M Ardi Kurniawan
NPM. 1931040120

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-Kpb) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani Di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”** telah diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada nabi besar Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini berkat dukungan, bantuan, motivasi, bimbingan, nasihat, serta doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Ahmad isnaeni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Abd Qohar, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung dan juga sebagai Pembimbing Akademik
4. Ibu Citra Wahyuni, M.Si selaku Sekertaris Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung
5. Ibu Tin Amalia Fitri, M.SI selaku pembimbing I dan ibu Angga Natalia, M.I.P selaku Pembimbing II dengan penuh keiklasan dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi
6. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai tingkat bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi.
8. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas yang

- telah memperkenankan peneliti dalam literatur penelitian skripsi.
9. Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat, khususnya Ibu Sayu Made Budiarni, S.P., M.P, selaku Ketua Bidang prasarana,sarana & penyuluhan yang telah membantu dalam proses kelancaran penulisan skripsi ini.
 10. Kepada Lurah Daya Murni dan bapak ketua RT Kelurahan Daya Murni yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan dengan baik.
 11. Kepada teman-teman ku seperjuangan kelas Pemikiran Politik Islam A yang selalu menjadi bagian dari proses yang saya lalui, terima kasih atas canda tawanya hingga saya bisa berada ditahap ini.
 12. Sahabat-sahabat ku, Achmad Akbar, Heldi Prayoga, Adjie Wardana Daulay yang telah menjadi teman berbagi keluh kesah selama peneliti menempuh Pendidikan.
 13. Seseorang yang pernah Bersama saya, terimakasih untuk patah hati yang diberikan pada saat proses penyusunan penelitian skripsi dan telah menjadikan motivasi bagi saya untuk membuktikan bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih baik. terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan peneliti. Sampai jumpa dalam versi terbaik menurut takdir.

Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah swt.

Aamiin Ya robbal Alamin.

Bandar Lampung, 2024
Penulis

M Ardi Kurniawan
NPM. 1931040120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987- Nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab-Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	S	(Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (Dengan Titik di Bawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Dad	D	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	ta'	T	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	za'	Z	Zet (Dengan Titik Di Bawah)
ع	'ain	'	Koma Terbalik Diatas
غ	Ghain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
لا	Lam alif		
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta'addid
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutoh

a. Bila dimatikan tulis

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang suddah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbutoh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul Fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
Fathah	Ditulis	A
Dammah	Ditulis	U

5. Vocal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى	Ditulis	Yas'a
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
ammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض	Ditulis	Furud

6. Vocal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
athah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

7. Vocal Pendek yang Beruntun dalam Satu Kajian Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اعدت	Ditulis	U'iddat
انتم	Ditulis	A'antum
ل أن شكرتم	Ditulis	La in syakartum

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti huruuf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوالفروضواو	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	14
I. Kerangka Pikir	20
J. Sistematika Penulisan	21

BAB II IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU PETANI BERJAYA (e-KPB) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. Implementasi Kebijakan Publik	23
1. Pengertian Kebijakan Publik	23
2. Pengertian Implementasi	25
3. Implementasi Kebijakan Publik	26
4. Model-Model Pendekatan Implementasi Kebijakan	27
5. Proses dan Tahapan Implementasi Kebijakan.....	31
B. Elektronik Kartu Petani Berjaya	32
1. Pengertan e-KPB	32
2. Tujuan e-KPB	33

C. Kesejahteraan Petani	34
1. Nilai Tukar Petani	35
2. Modal Petani	37
3. Ketahanan Pangan	39

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KECAMATRAAN TUMIJAR

A. Profile Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat	51
1. Sejarah Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat	51
2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tulang Bawang Barat	53
3. Visi dan Misi	54
4. Gambaran Umum Tentang Kelurahan Daya murni Kecamatan Tumijar Kabupaten Tulang Bawang Barat	55
5. Gambaran Umum Profile Aplikasi Kartu Petani Berjaya	57

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA

(e-KPB) DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN PETANI

A. Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya.....	61
1. Komunikasi	62
2. Sumber Daya	63
3. Disposisi	65
4. Struktur Birokrasi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah, karena pada dasarnya judul ini untuk memberikan gambaran keseluruhan dari isi proposal skripsi. Judul proposal skripsi penulis adalah **“Implementasi Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-Kpb) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Petani Di Desa Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”**. Agar mempermudah pemahaman makna dari judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah dalam judul skripsi tersebut.

Implementasi menurut Jones didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya¹. Dalam penelitian ini istilah implementasi di program elektronik kartu petani Berjaya dalam upaya kesejahteraan petani yang merupakan suatu program yang nantinya dilaksanakan secara sistematis.

Program Elektronik Kartu Petani Berjaya atau e-KPB adalah kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi Lampung yang berbasis teknologi informasi. Dalam program e-KPB tersebut sumber dana dari program ini ialah dari APBD daerah Provinsi Lampung. Adanya e-KPB dapat memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan benih atau bibit, pupuk, obat-obatan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan para petani dalam kapasitas pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani. Program kartu tani adalah suatu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan para petani. Dengan program ini diharapkan dapat menyeleksi dan memilih petani mana yang berhak menerima subsidi dari pemerintah, sehingga konsep subsidi/ bantuan yang terjadi bukan lagi produknya tetapi siapa (orang/individu) yang berhak untuk mendapatkan

¹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

sehingga bisa memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi². Program e-KPB dapat menghubungkan segala kepentingan pertanian yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan petani serta semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama berlandaskan peraturan gubernur no. 09 tahun 2020.

Peningkatan kesejahteraan petani adalah salah satu visi/misi dari pembangunan pertanian untuk mencapai suasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tingkat kesejahteraan petani saat ini baru diukur dari besaran nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar usaha pertanian (NTUP), kemiskinan di perdesaan dan rasio diperdesaan. Terdapat beberapa indikator yang bisa digunakan dalam mengukur kesejahteraan petani, yaitu dari data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga pertanian yang diolah menurut data survei sosial ekonomi nasional. Menghilang kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.

Menurut teori ernes engel apabila tidak adanya perbedaan selera maka presentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatkan pendapatan oleh karenanya komposisi pengeluaran rumah tangga pertanian bisa dijadikan untuk mengukur nilai tingkat kesejahteraan petani yang dimana semakin rendah presentase untuk pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran, jadi semakin baik tingkat perekonomian maupun kesejahteraan petani³. Kesejahteraan secara umum bila dilihat antar rumah tangga pertanian (RTP) dan rumah tangga non pertanian terlihat terjadi ketimpangan yang lebih melebar antar rumah tangga non pertanian, mengingat sumber pendapatan dengan lapangan usaha yang bervariasi yang mengakibatkan distribusi pengeluaran juga bervariasi. Sementara pada rumah tangga pertanian terlihat relative homogeny sehingga distribusi pengeluaran dirumah tangga non pertanian.

kesejahteraan bermasyarakat petani yang menggunakan

² Joko raharjo, implementasi kebijakan program kartu tani dikelompok tani sedyo utomo widoro kalurahan bangunharjo kapanewon sewon kabupaten bantul, *jurnal of indonesian rural and regional goverment*. Vol.6 No.1 (2022) h.47

³ Pusat data dan sistem informasi pertanian sekretariat jendral, *analisis kesejahteraan petani 2022* (jakarta: kementerian pertanian, 2022) h.1

elektronik kartu petani Berjaya (e-KPB) yang berada di tulang bawang barat kecamatan tumijajar. Berdasarkan penelitian diatas penelitian ini bermaksud membahas implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan petani di kabupaten Tulang Bawang Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spritual.

Suatu kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh allah swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia kan rusak dan kehidupan akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tipe asuransi pada bidang pertanian memiliki tujuan yaitu untuk mencegah kerugian pada petani apabila terjadi hal yang tidak diinginkan saat proses bercocok tanam. Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sekitar 28,79% penduduk Indonesia bekerja pada bidang sektor pertanian sebagai pekerjaan utama. Pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan perhatian lebih, hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Asuransi Pertanian bagi para petani untuk melindungi usaha mereka. Program Asuransi Pertanian memberikan alternative skema pendanaan yang akan melindungi pesertanya agar dapat kembali membiayai usaha pertanian di musim berikutnya apabila terjadi kegagalan hasil dari produksi panen. Asuransi Pertanian merupakan suatu bentuk perlindungan kepada para petani, melalui perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungnagan risiko usaha tani khususnya tani padi.

Sektor pertanian sebagai salah satu sector ekonomi termasuk yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Upaya pemerintah dalam penanganan terkait masalah-masalah yang terjadi terhadap petani, baik itu dalam hal pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yaitu melalui program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, yang di dasari dengan adanya peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2011. Dalam pertanian sendiri dimana merupakan suatu kegiatan memelihara tanaman dan ternak pada sebuah bidang tanah, tanpa menyebabkan tanah itu rusak untuk produksi selanjutnya, seperti dijelaskan dalam ayat Al Qur'an Surat An-Naziat : 30 - 31, berikut:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ ۳۰ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ ۳۱ ﴿٣١﴾

Artinya. 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. 31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

Adapun tafsiran menurut ayat diatas, Al-Qur'an adalah kembali berani secara alami untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan lingkungan yang tetap lestari. Beberapa istilah pertanian yang dipadukan dengan kata-kata lain yang mempunyai kesamaan maksud yaitu sistem pertanian yang lebih memperhatikan kelestarian lingkungan seperti pertanian alami, pertanian organik, pertanian berkelanjutan, pertanian alami. Dimana Manusia pun bertebaran untuk kepentingan-kepentingan agama dan dunia meraka. "dan bumi sesudah itu," yaitu setelah penciptaan langit,"dihamparkanNya," yakni Allah menempatkan di dalamnya berbagai manfaat. Hal itu dijelaskan dengan firmanNya,

"Ia memancarkan dari padanya mata airnya, dan (menumbuhkan)tumbuh – tumbuhannya. Dan gunung –gunung dipancangkanNya dengan teguh," yakni dikokohkan dengan bumi sehingga bumi terhampar setelah penciptaan langit sebagaimana dijelaskan secara nash dalam ayat – ayat al Qur'an. Bumi diciptakan sebelum penciptaan langit sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah, ”Katakanlah, ‘Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu – sekutu bagiNya? (yang bersifat)demikian itulah Rabb semesta alam. ‘ dan dia menciptakan di bumi itu gunung – gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan – makanan (penghuninya) dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang – orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, ‘Datanglah kamu berdua menurut perintahKu dengan suka hati.’ Maka dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap – tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang – bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik – baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.”

Referensi : <https://tafsirweb.com/12010-surat-an-naziat-ayat-30.html>

e-KPB dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua yang terlibat dalam proses pertanian secara koordinasi kedalam peraturan gubernur tentang Program Kartu Petani Berjaya. Dengan adanya kartu tani diharapkan dapat mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan 6T (enam tepat) yang meliputi Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi meluncurkan kartu petani berjaya Elektronik (e- KPB) di pasar Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Selasa, 26 juli 2022 Dengan Visi Provinsi lampung sendiri adalah Rakyat Lampung Berjaya dengan salah satu program unggulan untuk mendorong kesejahteraan petani adalah Program Kartu Petani Berjaya.

Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah penghasil pertanian yang memiliki rata- rata produksi yang cukup baik. Sistem pertanian yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat ini masih manual dalam mencari kebutuhan pertanian dalam halnya mencari pupuk hingga bibit petani yang dimana dalam mencari hal tersebut masih terpisah. Akses permodalan masih bersifat manual dan menunggu yang durasinya tidak bisa dipastikan dari si pemberi modal

tersebut, dalam hal mencari pupuk yang berkualitas juga masih seringkali adanya kelangkaan perihal pupuk yang di inginkan oleh petani, dalam hal segi informasi dan pengolahan sampai dengan panen masih bersifat turun temurun dalam mengelola pertanian. Kesejahteraan petani yang masih menganut sistem tersebut petani masih belum bisa merasakan kesejahteraan, dikarenakan segi akses untuk memenuhi kebutuhan untuk bertani masih sulit, dari kesusahan para petani maka lahirlah sebuah program yang dimana program tersebut bertujuan untuk mempermudah petani untuk dalam memenuhi kebutuhan pertanian dari segi bibit, pupuk, informasi dalam pengelolaan hingga permodalan.

Tabel 1.1
Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB)

No.	Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB)
1.	Layanan E-Keanggotaan Asuransi Petani
2.	Layanan E-Puber
3.	Layanan E-Saprotan
4.	Layanan E-Permodalan
5.	Layanan E-Asuransi
6.	Layanan E-Pemasaran
7.	Layanan E-Gudang Ternak
8.	Layanan Hallo Medic Vet
9.	Layanan E-Alsintan
10.	Layanan Sertifikasi Benih
11.	E-Market
12.	Pasar Lelang
13.	E-Bantuan
14.	E-Beasiswa

Sumber: KPB Kabupaten Tulang Bawang Barat

Berdasarkan data yang tercantum diatas yang telah peneliti dapatkan dari KPB Tulang Bawang Barat, dalam e-KPB memiliki

berbagai program dalam pelayanan dan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Kecamatan Tumijajar telah melaksanakan 11 layanan. Tetapi pada penelitian ini terfokus pada layanan e-Permodalan. E-Permodalan Petani, yang merupakan bentuk perlindungan kepada para petani melalui perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani khususnya padi.

Program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui kemudahan perolehan sarana produksi pertanian, akses permodalan, pembinaan manajemen usaha, penanganan panen dan pasca panen, serta pemasaran hasil usaha pertanian. Dalam pelaksanaannya, program e- KPB berbasis teknologi informasi. Adanya e-KPB memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan benih atau bibit, pupuk, obat-obatan secara tepat waktu sesuai kebutuhan para petani dalam kapasitas pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara mendalam dengan mengangkat permasalahan tersebut dalam implementasi layanan E-Permodalan program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan para petani.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dapat didefinisikan sebagai penekanan topik pada suatu fenomena yang lebih luas dan lebih mendalam untuk mengungkap secara lebih kaya dan lebih bermakna tentang suatu fenomena yang menjadi objek penelitian⁴.

Setelah membaca dan memperhatikan penjabaran latar belakang diatas.

- a. fokus pada penelitian ini membahas tentang implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten

⁴ Galang Surya Gumilang, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Konseling* (Kediri: Universitas NusantaraPGRI, 2016)

Tulang Bawang Barat.

- b. Sub fokus penelitian yaitu proses pengimplementasi kebijakan program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan memperhatikan model dari implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:
 1. komunikasi
 2. struktur birokrasi
 3. sumber daya
 4. disposisi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) permodalan dalam upaya kegiatan petani di kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian serta latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari diterapkannya program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dalam upaya mensejahterakan petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak terkait.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah analisis kebijakan publik dalam bagaimana implikasi program

Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB).

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi pemerintah

Bagi pihak Dinas Pertanian, penelitian ini kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dalam menerapkan strategi, serta untuk menambah ilmu pengetahuan tentang strategi pemerintah dalam mengembangkan potensi alam dibidang pertanian.

b. Bagi pengguna e-KPB Permodalan

Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat serta dapat memberikan wawasan ilmu untuk mengelola pertanian.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan acuan untuk menambahkan bahan referensi selanjutnya sesuai dengan tema yang dibahas.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang terdahulu dan juga yang relevan dengan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Hal ini ditunjukkan untuk memperkaya teori dalam mengkaji penelitian serta menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Sejauh yang peneliti ketahui belum terdapat dengan judul yang sama yang dipakai untuk penelitian ini. Terdapat beberapa hasil dari penelitian yang peneliti temui membahas tentang penelitian ini ialah:

1. Jurnal yang berjudul **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung**⁵ Karya M Yusuf S Barusman, Indriati Agustina Gultom, Ahmad Cucus, Appin Purisky Redaputri Universitas Bandar Lampung. Jurnal Ekonomi Pertanian dan

⁵Appin Purisky Redaputri M Yusuf S Barusman, Indriati Agustina Gultom, Ahmad Cucus, 'Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 5 (2021).

Agribisnis (JEPA) Volume 5, Nomor 4 (2021). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Data dikumpulkan melalui studi literatur serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan para narasumber. Narasumber pada penelitian ini merupakan perwakilan dari akademisi, praktisi, dan pengamat Pertanian Lampung. Hasil penelitian ini adalah Model Kelembagaan Sistem Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah model yang menggambarkan hubungan antar elemen yang terkait dengan bekerjanya program Kartu Petani Berjaya (KPB). Adapun lembaga-lembaga yang terlibat adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Pemasok Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Teknologi, Badan Usaha Milik Daerah yang terlibat sebagai Pengelola Kartu Petani Berjaya (KPB), Buyers/ Market, Perbankan, Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES)/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/Koperasi/Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Petani. Kartu Petani Berjaya ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan modal, pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi pertanian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang hubungan antar elemen yang terkait dengan bekerjanya program Kartu Petani Berjaya (KPB), sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi dari program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e- KPB) yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Skripsi berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09**

Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya⁶

Karya Nisaul Hasanah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 di Desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Kartu Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Tentang Kartu 6 Petani Berjaya di Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini menggunakan metode wawancara. Metode penentuan responden pada penelitian ini menggunakan metode sampling dengan jumlah responden sebanyak petani. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi dan efektivitas program Kartu Petani Berjaya di desa Kutoarjo secara keseluruhan belum mencapai hasil yang maksimal karena hanya petani yang terdaftar dalam kelompok tani saja yang menerima Kartu Petani Berjaya dan petani yang sudah mendapatkan Kartu Petani Berjaya belum menggunakan Kartu dengan alasan keberatan untuk meminjam modal melalui Kartu tersebut, dan petani merasa susah untuk mengakses Kartu Petani Berjaya melalui aplikasi, hanya beberapa petani saja yang baru menggunakan Kartu Petani Berajaya untuk meminjam modal KUR dan untuk menebus pupuk. Serta dalam pelaksanaannya Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) belum menerapkan kekuasaan semestinya memiliki kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil tentang Kartu Petani Berjaya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi ialah skripsi ini membahas tentang pelaksanaan implementasi dan efektivitas program Kartu

⁶Nisaul Hasanah, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.', 2020.

Petani Berjaya di desa Kutoarjo, sedangkan skripsi saya membahas tentang implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e- KPB) yang terletak di kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Jurnal yang berjudul **Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Pringsewu**⁷ Karya Biblio Butaflika, Dwi Haryono, dan Teguh Endaryanto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu dengan jumlah sampel sebanyak 96 orang petani padi. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis model fungsi produksi Cobb-Douglas dan analisis pendapatan usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Petani Berjaya berpengaruh nyata terhadap produksi usahatani padi di Kabupaten Pringsewu. Program Kartu Petani Berjaya mampu meningkatkan pendapatan usahatani padi atas biaya total di Kabupaten Pringsewu sebesar 37,02 persen. perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya ialah skripsi ini membahas dampak program kartu petani Berjaya terhadap produksi dan pendapatan usaha tani padi di kabupaten pringsewu, sedangkan fokus skripsi saya ialah tentang implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e- KPB) yang terletak di kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Jurnal yang berjudul **Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Adopsi Inovasi Petani Pada Program Kartu Petani Berjaya Di Kecamatan Gadingrejo**⁸ Karya Reinata Rhamadanti, Indah Listiana, Dewangga Nikmatullah,

⁷ Biblio Butaflika Dwi Haryono, Teguh Endaryanto, 'Dampak Program Kartu Petani Berjaya Terhadap Produksi Dan Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Pringsewu.', *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/*

⁸ Reinata Rhamadanti Indah Listiana, Dewangga Nikmatullah, Muhammad Ibnu, 'Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Adopsi Inovasi Petani Pada Program Kartu Petani Berjaya Di Kecamatan Gadingrejo', *Journal of Agriculture and Social Development*, 2 (2021).

Muhammad Ibnu. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Responden adalah 46 petani dari perwakilan kelompok tani di 6 desa berbeda dengan hasil produksi padi tertinggi berdasarkan wilayah binaan masing-masing penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sedang, tingkat adopsi inovasi petani dalam pelaksanaan Program KPB dalam kategori sedang, dan dari penelitian diketahui bahwa peran penyuluh berpengaruh terhadap peningkatan adopsi inovasi petani pada pelaksanaan Program KPB di Kecamatan Gadingrejo perbedaannya skripsi ini. dengan skripsi saya ialah skripsi ini membahas tentang Adopsi Inovasi Petani Pada Program Kartu Petani Berjaya Di Kecamatan Gadingrejo, sedangkan skripsi saya berfokus membahas implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) guna meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Skripsi yang berjudul **Hubungan Perilaku Petani Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani Di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus**⁹ Karya Dyah Ayu Permataningrum, Siwi Gayatri, Kadhung Prayoga. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2021 – Juni 2021 di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan perilaku petani terhadap kartu tani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dan (3) menganalisis hubungan perilaku petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani ini di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Metode penelitian ini menggunakan metode survey. Metode penentuan responden pada penelitian ini menggunakan metode quota sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 petani. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis korelasi rank

⁹ Dyah Ayu Permataningrum Siwi Gayatri, Kadhung Prayoga, 'Hubungan Perilaku Petani Dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani Di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus', *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2022.

spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku petani terhadap kartu tani termasuk dalam kategori sedang. Efektivitas pelaksanaan program kartu tani termasuk dalam kategori efektif. Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara perilaku petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani, dengan koefisien korelasi sebesar 0,613. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi ialah skripsi ini membahas hubungan dari perilaku petani dengan efektivitas pelaksanaan program kartu tani di kecamatan undaan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi dari program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) yang ada di kabupaten Tulang Bawang Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam pembuatan sebuah penelitian, adapun metode yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) responden. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang terjadi pada objek penelitian seperti tindakan, perilaku, resepsi, motivasi, dengan cara mendeskripsikan kata-kata bahasa dalam konteks alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah kejadian yang nyata di lapangan berguna untuk memberikan sebuah penjelasan terhadap permasalahan yang terjadi¹⁰.

¹⁰ Hassan Sadhily, *Enslikopedi Indonesia* (Jakarta: PT Ictiar BARu - Van

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diambil secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti dari objek utama penelitian.¹⁰

Data primer dalam penelitian ini menggunakan hasil observasi, wawancara, dokumentasi terhadap sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu **Dinas Pertanian kabupaten tulang bawang barat**.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability* sampling yaitu dengan probabilitas yang tidak sama dan menggunakan teknik purposive sampling, purposive sampel merupakan teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu¹¹.

Tabel 1.2
Kriteria Narasumber

No	Kriteria
1	Memiliki usaha tani/ladang
2	Mengikuti e-KPB asuransi petani
3	Merupakan bagian dari Dinas Pertanian

Tabel 1.3

Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Ali Burhan	Koord KPB Tumijar
2	Isa	Petani
3	Gendis	Petani
4	Yono	Petani
5	Redi	Petani
6	Muhammad Andi	Petani

Hoeve, 1991).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2017).

7	Piyah	Petani
8	Aliudin	Petani
9	Rosita	Petani
10	Pepen	Petani

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau sudah diolah terlebih dahulu dan telah dibagikan kepada khalayak umum oleh lembaga yang telah mengumpulkan¹². Data sekunder dalam penelitian ini berupa beberapa karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, artikel serta literature lainnya sebagai penunjang memberikan informasi penelitian. Berdasarkan uraian data tersebut data sekunder penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pergub nomer 9 tahun 2020 tentang program kartu petani Berjaya
- 2) Profil kabupaten Tulang Bawang Barat

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi tidak langsung yaitu dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis apa yang terjadi dan diselidiki. Artinya, observasi tidak terbatas kepada pengamatan yang dilakukan bisa secara langsung ataupun tidak langsung¹³. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi tidak langsung ke Dinas Pertanian kabupaten tulang bawang barat.

¹² Kristi. Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia* (Jakarta: Fakultas Psikologi UI,2005).

¹³ Sofian Singarimbun, Masri. Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995).

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah jadi pihak pewawancara mengajukan pertanyaan dan pihak diwawancara memberikan jawabannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik yang tersusun secara sistematis.

c. Dokumentasi

Dalam teknik ini bisa diartikan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan data-data seperti buku, catatan dokumen yang di mana dijelaskan oleh sanafiah Faisal yaitu sebagai berikut: dengan metode dokumenter yang isinya menginformasikan bahan tertulis dan tercatat. Dalam metode ini peneliti hanya mengumpulkan data dan tinggal mentransfer bahan data tertulis yang relevan padalembarnya¹⁴.

4. Teknik Analisis Data

Berikut beberapa Teknik analisis data, sebagai berikut :

a. **Reduksi Data**

Reduksi data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci untuk dilakukan penyederhanaan data serta memfilter data-data yang dicatat oleh peneliti, dalam proses berlangsungnya pelaksanaan penelitian bahkan sebelum melakukan pengumpulan data untuk ditata kembali supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mencatat yang sudah dicatat.

Langkah-langkah reduksi data ada beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Mengorganisasikan data-data yang didapat, serta mengelompokkan hasil- hasil wawancara

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

berdasarkan dengan tahapan penelitian yaitu dengan kelompok kebijakan serta peran dan meringkas data yang diperoleh dari informan pada saat wawancara.

- 2) Peneliti menyusun catatan dari berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas. Salah satu cara yang dipakai dalam produksi data bisa melalui seleksi dengan cara melakukan ringkasan atau uraian yang singkat dan menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas.
- 3) Setelah melakukan wawancara kepada informan yang diwawancarai, peneliti membuat catatan kecil atau ringkasan. Hal ini berlangsung secara terus-menerus hingga wawancara selesai. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat, maka peneliti membuat pilihan pelangan tentang bagian data yang mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data yang masih tersebar¹⁵.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini adalah sekumpulan data informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, biasanya hal ini dilakukan dalam pertukaran yang singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya¹⁶. Dengan menyajikan data tersebut maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan direncanakan kerja selanjutnya.

¹⁵ Hadi Sutrisno, *Metode Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).

¹⁶ dkk Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif, Repository.Uinsu.Ac.Id*, 2020.

c. **Penarikan Kesimpulan**

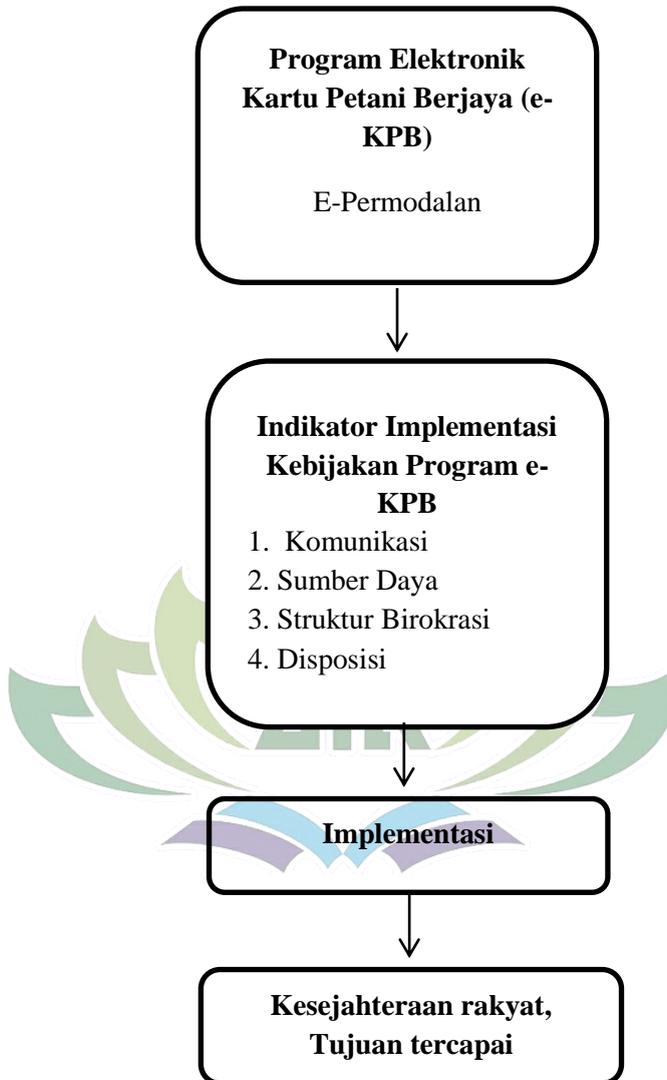
Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dimulai dari adanya permulaan pengumpulan data, seseorang analis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan serta pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat serta proporsinya. hal ini adalah langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif untuk menentukan hasil dari program elektronik kartu petani Berjaya dalam upayamensejahterakan petani.

d. **Triangulasi**

Triangulasi adalah untuk melakukan strategi triangulasi antar sumber-sumber data yang didapat sehingga dapat meningkatkan akurasi sebuah penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini triangulasi yang dipakai oleh penelitian yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan data yang telah didapatkan dari berbagai sumber yang selanjutnya dideskripsikan, dikategorikan yang sama dan yang beda dari sama dan yang beda dari semua sumber data tersebut. Dan yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

¹⁷ Fajar. Haryoko, Spto. Bahartiar. Arwadi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Prosedur Analisis*, Edisi Pertama (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).

I. Kerangka fikir



Gambar 1.1 Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:

Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil oleh orang, kantor, organisasi publik atau swasta dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pilihan kebijakan. Proses Implementasinya terjadi setelah

melewati sejumlah tahapan, seperti pengesahan Undang-Undang, setelah itu kebijakan yang berlaku dipraktikkan. Tindakan menerapkan apa pun juga dapat dianggap sebagai menjalankan strategi yang terencana dan tepat secara menyeluruh.

Implementasi program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB) dapat membantu dari segi ekonomi. Hal ini sangat bermanfaat, sebab dengan adanya program e-KPB masyarakat yang menggunakan program tersebut dapat memenuhi kebutuhan pertanian sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan telah dilakukan pemerintah. Dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam program-program pertanian dan salah satunya ialah program Elektronik Kartu Petani Berjaya (e-KPB).

J. Sistematika Pembahasan

Guna untuk mempermudah penyusunan skripsi penulis, berikut sistematika pembahasan skripsi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Kemudian pada bab satu ini menggambarkan skripsi secara keseluruhan tetapi dalam suatu kesatuan yang ringkas dan padatguna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, keempat dan kelima.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang implementasi kebijakan, program elektronik kartu petani Berjaya (e-KPB), kesejahteraan petani.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum dari objek penelitian, seperti demografis kabupaten tulang bawang barat, sejarah tulang bawang barat, visi misi tulang bawang barat, struktur

pemerintahan tulang bawang barat, kondisi penduduk, kondisi mata pencarian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

pada bab ini berisikan hasil data tentang bagaimana implementasi dari diterapkannya program elektronik kartu petani Berjaya dalam upaya mensejahterakan petani.

BAB V PENUTUP

pada bab penutup ini meliputi kesimpulan dan rekomendasi



BAB II

IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU PETANI BERJAYA (E-KPB) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya antara hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat di segala aspek ialah kebijakan yang mengarah pada kepentingan publik atau masyarakat. Pengertian kebijakan (*policy*) yaitu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menepatkan pengambilan keputusan. Pada setiap penyusunan kebijakan publik diawali dengan perumusan masalah yang sudah diidentifikasi lalu pelaksanaan kebijakan itu ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat¹⁸.

Menurut Charles O. Jones, kebijakan (*policy*) digunakan pada praktek sehari-hari tetapi digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah tersebut sering kali dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design¹⁹.

Kemudian menurut James Anderson istilah “kebijakan” atau “*policy*” secara umum digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau pun sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu²⁰. kebijakan yang seperti ini digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan

¹⁸ Mustari, Nuryanti. Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik) (Yogyakarta:LeutikaPrio, 2015), h.1-2

¹⁹ Jones, O, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Policy*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

²⁰ Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Holt, Rinehart and Winston: New York.

biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Sedangkan di dalam buku Wahab yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya dikemukakan pendapat Raymond Bauer dalam tulisannya yang berjudul *the study of policy formulation*, menyebutkan pembuatan kebijakan publik sebagai bentuk proses transformasi atau perubahan input - input politik menjadi output - output politik. Pandangan yang dikemukakan oleh Bauer ini dilandaskan oleh teori analisis publik, sebagaimana yang dianjurkan oleh David Easton²¹. menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai dampak dari aktifitas pemerintah²².

Kebijakan publik memiliki hubungan yang erat antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan masyarakat yang meliki kepentingan terhadap kebijakan. M.Irfan Islamy mengatakan bahwa pada konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi dari pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakilkan rakyat, tapi opini publik pun memiliki bagian yang sama besar untuk diisikan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. M.Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen yang penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a) Kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berbentuk tindakan tindakan pemerintah.
- b) Kebijakan publik tidak cukup jika hanya disampaikan sebagai wacana, tetapi juga dilaksanakan dengan nyata.
- c) Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d) Kebijakan publik itu harus selalu ditujukan untuk

²¹ Wahab. 1998. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.

²² Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195- 224

kepentingan seluruh masyarakat²³.

Berdasarkan uraian definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan-kewenangan pemerintah dalam menanggapi masalah yang mengarah pada kepentingan publik atau masyarakat yang ditujukan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dimasyarakat dan dapat mempengaruhi seseorang, kelompok / komunitas, masyarakat, maupun suatu lembaga pemerintah.

2. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara umum implementasi ialah suatu bentuk tindakan atau pelaksanaan rencana yang dikemukakan dalam buku yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme pada suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan juga suatu kegiatan yang terencana dan terperinci untuk mencapai tujuan kegiatan²⁴.

Subarsono mengemukakan pendapatnya dalam buku yang berjudul Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Implementasi adalah suatu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kegiatan atau pekerjaan, yang menggunakan sarana sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan²⁵.

Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi merupakan suatu bentuk Tindakan yang dilakukan oleh seorang individu tau seorang pejabat atau komunitas atau pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan dalam suatu

²³Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan. (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2001).

²⁴ Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

²⁵ Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

keputusan kebijakan²⁶.

Berdasarkan uraian pengertian implementasi diatas, peneliti menyimpulkan definisi dari implementasi adalah implementasi tidak hanya aktivitas saja tetapi juga sebuah kegiatan yang terancang, tertata, serta terperinci dengan matang berdasarkan pada acuan aturan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang ingin diraih pada suatu kegiatan yang dimana pada kegiatan membutuhkan sarana dan prasarana sehingga dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

3. Implementasi Kebijakan Publik

Di dalam buku Eko Handoyo yang berjudul Kebijakan Publik, Hill dan Hupe (2002) mengemukakan bahwa implementasi berhubungan dengan kebijakan spesifik nya pada respon khusus terhadap masalah masalah yang terjadi di masyarakat²⁷.

Implementasi kebijakan adalah suatu bentuk tahapan dari proses kebijakan segera setelah melewati penetapan undang-undang. Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin didalam buku Winarno yang berjudul Kebijakan Publik : Teori dan Proses, implementasi kebijakan yaitu apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau sejenis keluaran yang nyata. Implementasi merujuk pada suatu kegiatan yang mengikuti pernyataan untuk mencapai tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pemerintah.

Kegiatan implementasi meliputi tindakan dari berbagai aktor, spesifiknya para birokrat, yang tugasnya untuk membuat program berjalan. Berhubungan dengan badan-badan pelaksana dari kebijakan, implementasi kebijakan meliputi dari empat macam kegiatan. Yang pertama adalah badan-badan pelaksana yang ditugaskan undang-undang dengan tanggung jawab untuk

²⁶ Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis kebijaksanaan : Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

²⁷ Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya. H. 93-

menjalankan program harus dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dengan harapan implementasi dapat berjalan lancar. Lalu yang kedua yaitu badan-badan pelaksana dapat mengembangkan anggaran dasar menjadi arahan-arahan yang nyata, regulasi, dan rencana serta desain program. Kemudian yang ketiga, badan-badan pelaksana harus bisa mengorganisir kegiatan-kegiatan dengan menciptakan berbagai unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Dan yang terakhir, badan-badan pelaksana dapat memberikan keuntungan atau pembatasan ke para pelanggan atau kelompok target²⁸.

Van Meter dan Van Horn, seperti yang dikutip oleh Y. Gede Sutmasa dalam penyusunan implementasi kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada keputusan kebijakan²⁹.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan definisi dari implementasi kebijakan yaitu kegiatan-kegiatan dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan kepada individu, kelompok, pemerintah, ataupun masyarakat untuk mencapai tujuan kebijakan.

4. Model Model Pendekatan Implementasi

Ada berbagai model pendekatan implementasi menurut para ahli seperti, van Meter dan van Horn (1975), Grindle (1980), Mazmanian dan Sabatier (1987), dan Edward III. Menurut Edward III yang dimuat dalam buku Widodo yang berjudul Robotika – Teori dan Implementasinya terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan proses implementasi kebijakan antara lain :

1) Komunikasi

²⁸ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik :Teori dan Proses. Yogyakarta :Med Press

²⁹ Sutmasa, Y. Gede. 2021. Memastikan Efektifitas Implementasi Kebijakan Publik. FISIP, Universitas Mahendradatta Bali.

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan tercapai secara berhasil atau tidak tujuan implementasi kebijakan publik tersebut. Implementasi akan sangat efektif jika para pembentuk keputusan telah mengetahui apa saja yang akan dikerjakan, dengan mengetahui apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan lancar apabila diikuti dengan komunikasi yang baik³⁰.

Menurut Agustino terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi yaitu :

a. Transmisi

Penyampaian komunikasi dengan baik akan mendapatkan hasil implementasi yang baik juga, sering sekali terjadi salah pengertian (*misscommunication*) jika penyampaian komunikasi dilakukan dengan kurang baik. Hal itu terjadi karena komunikasi telah melewati beberapa tingkatan birokrasi, oleh karena itu bisa terjadi penyimpangan makna dalam komunikasi.

b. Kejelasan

Bentuk komunikasi yang disampaikan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Pesan kebijakan yang tidak jelas tidak selalu dapat menghalangi implementasi, pada jenjang tertentu. Para pelaksana membutuhkan fleksibilitas untuk melaksanakan kebijakan, akan tetapi di jenjang yang lain justru dapat menyelewengkan tujuan yang akan dicapai yang telah ditetapkan melalui kebijakanyang sudah ditetapkan.

c. Konsistensi

Perintah pada pelaksanaan kebijakan harus konsisten serta jelas. Karena apabila perintah pelaksanaan kebijakan kerap berubah-ubah, akan membuat pelaksana kebingungan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa

³⁰ Budiharto, Widodo. 2010. Robotika – Teori dan Implementasinya. Yogyakarta : Penerbit Andi

komunikasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan³¹.

2) Sumber Daya

Menurut Edward III yang dikutip dalam buku Agustino yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Indikator sumber daya antara lain :

1. Staff

Sumber daya yang paling utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu salah satu penyebab gagalnya implementasi kebijakan adalah staff yang kurang cukup, staff yang kurang memadai, atau tidak kompetennya para staff³².

2. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan terbagi menjadi dua bentuk antara lain :

- a. Informasi yang berkaitan dengan cara pelaksanaan implementasi. Implementor harus memahami dengan apa yang harus dilakukan saat diberi perintah untuk melakukan suatu Tindakan.
- b. Informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah pihak pihak terkait mematuhi peraturan atau tidak³³.

3. Wewenang

Pada dasarnya wewenang bersifat formal. Wewenang adalah otoritas atau legitimasi bagi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam bentuk politik.

³¹ Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

³² Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta

³³ Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta

4. Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang penting juga dalam proses implementasi kebijakan. Meskipun staff tercukupi serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil³⁴.

3) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan kesesuaian dari organisasi birokrasi itu sendiri yang menjadi pelaksana dari implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi perlu dijaga karena jika terjadi birokrasi fragmentasi akan menghambat proses pelaksanaan dari kebijakan publik³⁵.

Menurut Edward III karakteristik dari struktur birokrasi ada 2 yaitu, Standart Operating Procedur (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan tanggapan internal pada patas waktu yang telah ditentukan dan sumbernya dari para pelaksana serta keinginan untuk mencapai keseragaman pada organisasi yang kompleks dan tersebar luas.

SOP dapat menghalangi implementasi kebijakan yang baru yang membutuhkan inovasi pada cara kerja serta staff dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin signifikan inovasi yang dibutuhkan dalam SOP, maka akan semakin besa juga SOP tersebut menghambat implementasi. Tetapi dari inovasi tersebut SOP mempunyai manfaat untuk organisasi dengan prosedur perencanaan yang lebih baik dan control yang sejalan dengan program, SOP akan dapat lebih menyesuaikan dengan tanggung jawab baru³⁶.

³⁴ Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

³⁵ Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya. H. 93-

³⁶ Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta

4) Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik dari pelaksana kebijakan publik contohnya seperti kejujuran, ketaatan, komitmen dalam pelaksanaan kebijakan public. Jika pelaksana mempunyai disposisi yang baik, maka pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila pelaksana mempunyai disposisi yang berbeda itu akan menghambat proses dari implementasi kebijakan publik³⁷.

5. Proses dan Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi mengarah pada tindakan-tindakan untuk memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan pada suatu kebijakan. Tindakan tersebut mencoba untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang ada menjadi suatu pola operasional dan mencoba untuk mencapai perubahan atau pembaruan atau inovasi yang besar maupun kecil sebagai mana seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah suatu upaya pemahaman tentang apa yang telah terjadi setelah suatu program dilaksanakan.

Proses dari implementasi kebijakan bukan hanya melibatkan satu instansi yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan, tetapi melibatkan juga jaringan politik, ekonomi, dan sosial. Pada jenjang praktis, implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan pada kebijakan dasar.

Proses itu terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

1. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
2. Pelaksanaan keputusan dari instansi pelaksana
3. Kesiapan kelompok sasaran dalam menjalankan kebijakan
4. Pengaruh yang nyata dalam kebijakan baik yang

³⁷ AG. Subarsono.2005. "ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK " (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dikehendaki ataupun tidak

5. Pengaruh kebijakan seperti yang diharapkan pembuat kebijakan
6. Upaya perbaikan dari kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Pada proses implementasi setidaknya melibatkan hal-hal penting seperti sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan yang menjadi rencana serta arahan yang dapat diterima dan dijalankan sesuai dengan yang semestinya³⁸.

B. Elektronik Kartu Tani Berjaya

1. Pengertian e-KPB

Dalam rangka peningkatan kapasitas petani terhadap pembagunan pertanian diperlukan kelembagaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani (posisi tawar yang tinggi). Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah³⁹:

2. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran;
3. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm)
4. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah

³⁸ Fauzi Yudistira, 2010". Implementasi Kebijakan Publik". <http://www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik>

³⁹ Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul 13.00 Wib

organisasi petani belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi bargaining position petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani.

Berdasarkan hal tersebut Provinsi Lampung saat ini telah memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa Program unggulan berupa Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam Program KPB merupakan inisiasi yang baik, karena dalam program tersebut telah dilakukan pendataan dan pemetaan petani dengan dengan sistem digital baik yang mendapatkan subsidi maupun tidak.

2. Tujuan e-KPB

Kartu Petani Berjaya adalah suatu program, yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama yang mencakup:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem

- pendidikan dibidang pertanian;
- b. Pengembangan pasar dan jaringan pemasaran yang berpihak kepada petani berupa pasar alternatif dengan rantai tata niaga pendek (direct marketing), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar serta meningkatkan kemudahan layanan akses sumber informasi dan teknologi;
 - c. Penyuluhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDK) yang meliputi mengenai informasi prakiraan iklim yang handal guna menekan angka gagal panen akibat perubahan iklim yang ekstrim. Dengan adanya informasi prakiraan iklim yang handal petani dapat menyesuaikan system budidaya atau strategi penanaman dengan prakiraan iklim tersebut;
 - d. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi, kewirausahaan, dan manajemen usaha tani melalui penyuluhan pertanian, dan pengembangan sistem pendidikan dibidang pertanian;
 - e. Pembiayaan pertanian melalui lembaga keuangan khusus yang melayani petani;
 - f. Pengawasan kondisi pertanian daerah, membuat kebijakan, dan menjaminstabilitas harga jual hasil pertanian⁴⁰.

C. Kesejahteraan petani

Banyak faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesejahteraan petani. Di antara faktor-faktor tersebut, yang terpenting adalah tingkat pendapatan petani karena ini berkaitan langsung secara positif terhadap tingkat kesejahteraan petani. Tingkat pendapatan itu sendiri ditentukan oleh dua faktor secara bersamaan yakni harga jual dan volume produksi, jadi dalam kasus petani padi pendapatannya di tentukan

⁴⁰ Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul 13.00 Wib

oleh harga gabah/beras dan volume padi/gabah yang dihasilkan. Selain itu, banyak petani menggunakan buruh yang umum di sebut buruh tani, maka upah yang di terima buruh tani juga bagian penting dari kesejahteraan petani. bagi sektor pertanian lahan atau tanah merupakan input terpenting semua komoditi pertanian tumbuh di tanah. Dalam teori ekonomi klasik mengenai fungsi produksi, hanya dua input yang dianggap penting yakni lahan dan tenaga kerja, dan memang pada zaman tersebut pertanian merupakan sektor utama atau dominan di dunia. Namun demikian Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah lewat peningkatan mekanisme dalam proses produksi⁴¹.

indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran Rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya. Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dalam kategori sejahtera dan belum sejahtera. Untuk mengukur masing-masing klasifikasi kesejahteraan, ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah. Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita per tahun, yaitu total pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran pangan dan non pangan dalam setahun dibagi dengan jumlah tanggungan rumah tangga.

1. Nilai tukar petani

Nilai tukar petani adalah rasio antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani. Artinya, besar-kecilnya nilai tukar petani selain oleh penghasilan petani juga ditentukan oleh biaya/ongkos produksi yang dikeluarkan petani. Dalam tanaman pangan adalah total ongkos/biaya yang

⁴¹ tulus T.H. tambunan , “jokowi dan kedaulatann pangan” (Jakarta: mitra wacana media,2015) 123

dikeluarkan petani untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per-musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (misalnya, untuk padi) dan biaya sewa lahan jika bukan milik sendiri, biaya sewa alat/sarana usaha bukan milik sendiri, biaya upah pekerja jika menggunakan pekerja bukan anggota keluarga, dan biaya bunga kredit modal jika bukan modal sendiri⁴².

Nilai Tukar Petani yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Sesuai sensus dari BPS, nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib). Melalui It, dapat dilihat fluktuasi harga jual hasil produksi petani, sedangkan melalui Ib dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat perdesaan termasuk rumah tangga (RT) petani dan fluktuasi harga barang dan jasa sebagai input yang diperlukan petani untuk produksinya. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai tukar petani juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani maupun biaya produksi petani. Semakin tinggi nilai tukar petani berarti secara relative semakin kuat daya beli petani. Oleh karena itu, nilai tukar petani dapat digunakan sebagai sebuah alat pengukur alternative tingkat kesejahteraan petani.

⁴² Tulus T.H. Tambunan, Jokowi dan Kedaulatan Pangan, 138-142.

2. Modal Petani

Bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung (menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan masa yang akan datang), pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam kredit produksi, namun belum semuanya di manfaatkan dengan baik, baik dari segi sasaran maupun pengelolaan. Sehubungan dengan pemilikan modal, petani diklasifikasikan sebagai petani besar, kaya, cukupan, dan komersial, serta petani kecil, miskin, tidak cukupan, dan tidak komersial. Dalam pengembangan pertanian, ketersediaan modal dalam jumlah banyak cukup dan tepat waktu merupakan unsur penting dan strategis.

Modal dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih dari pada itu untuk membeli sarana produksi pertanian. Misalnya, bibit, pupuk, dan lain-lainya yang memungkinkan petani melakukan proses produksi, yang selanjutnya untuk mendapatkan uang hasil penjualan produk usaha taninya. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari Lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Sumber pembiayaan nonperbankan yang telah berkembang, antara lain taskin, agribisnis, modal ventura, laba BUMN, pegadaian, Lembaga keuangan mikro, pola kontrak investigasi kolektif (KIK), dan lain-lain.

Adanya krisis ekonomi, undang-undang No. 23 Tahun 1999, dan Lol antara pemerintah Indonesia dengan IMF mengakibatkan ketersediaan modal dengan suku bunga murah sangat terbatas sehingga kredit untuk usaha agribisnis mengarah ke suku bunga komersial atau bunga pasar. Sumber pembiayaan dari Lembaga nonperbankan dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk usaha argibisnis. Sumber pembiayaan tersebut menerapkan pola kredit dengan suku bunga, bagi hasil, bergulir, dan lain-lain. Dari beberapa informasi yang diperoleh, petani dan pelaku agribisnis memiliki usaha yang feasible, bahkan ada yang mampu

membayar harga modal 5-20% perbulan, namun seringkali petani dan pelaku agribisnis tidak bankable.

Pada prinsipnya, petani dan pelaku agribisnis lebih mengharapkan mekanisme pembiayaan yang mudah jika dibandingkan dengan pembiayaan yang murah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dan pelaku agribisnis tidak bankable, antara lain:

- 1) Tidak adanya kolateral (jaminan), terutama jika berhubungan dengan Lembaga keuangan formal, jaminan yang umum dimiliki adalah tanah, sementara kenyataan menyebutkan bahwa masih banyak permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah. Secara umum, tidak adanya pengakuan terhadap asset yang dimiliki petani karena tidak adanya bukti hukum terhadap asset-aset tersebut.
- 2) Adanya track record yang buruk terhadap Lembaga pembiayaan yang pernah ada, misalnya KUT (kredit usaha tani).
- 3) Sulitnya petani dan pelaku agribisnis lain secara langsung mengikuti formalitas yang diharapkan pihak bank.
- 4) Lembaga keuangan formal kebanyakan tidak mampu, mungkin juga tidak mau atau tidak mengerti dan tidak memahami sifat nature dari kegiatan pertanian, misalnya masalah *gestateperiod*, hubungannya dengan musim, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa faktor penyebab tidak bankable nya petani dan pelaku agribisnis tersebut maka kendala utama pembiayaan usaha agribisnis adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya bank yang khusus untuk membiayai pertanian (bank pertanian)
- 2) Kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor agribisnis.
- 3) Terbatasnya Lembaga penjaminan kredit untuk sektor pertanian.

- 4) Proses pembelanjaan dari pola *channeling* ke pola *executing*.
- 5) Adanya program pemerintah yang sifatnya bantuan menghambat penyaluran kredit perbankan.
- 6) Kesan perbankan bahwa sektor agribisnis masih *high risk*.

Sehubungan dengan itu strategi pengembangan pembiayaan nonperbankan dalam rangka pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menyempurnakan kebijakan pembiayaan nonperbankan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan lebih baik lagi oleh petani dan pelaku agribisnis.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis terhadap sumber pembiayaan nonperbankan.
- 3) Mensosialisasikan sumber pembiayaan nonperbankan yang telah ada
- 4) Menjalin kerja sama dengan sumber pembiayaan nonperbankan, baik dalam negeri maupun luar negeri⁴³.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya, dan sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai factor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan lain sebagainya.

Ketahanan pangan terwujud apabila secara umum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya

⁴³ Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) 98-100

pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari kehari. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga merupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan pangan daerah dan nasional. Berdasarkan tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan.

Melalui proses pemberdayaan, masyarakat ditingkatkan kapasitasnya agar semakin mampu meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatannya, baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan daya beli, sehingga menambah keleluasaan masyarakat untuk memilih pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Peningkatan produksi komoditas pangan oleh masyarakat, di samping meningkatkan ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga akan memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di daerah yang bersangkutan, yang selanjutnya merupakan kontribusi terhadap ketersediaan pangan nasional. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang rentan terhadap masalah kerawanan pangan seperti golongan miskin, ibu hamil dan anak balita, pemerintah wajib mengupayakan jaminan akses pangan bagi mereka, agar terpenuhi haknya untuk memperoleh pangan yang cukup.

Pada tataran nasional, inti persoalan dalam mewujudkan ketahanan pangan selama lima tahun terakhir terkait dengan adanya pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaannya. Permintaan pangan meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta perkembangan selera. Dinamika sisi permintaan ini menyebabkan kebutuhan

pangan secara nasional meningkat dengan cepat, baik dalam jumlah, mutu, dan keragamannya. Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala oleh adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam. Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, maka kebutuhan akan impor pangan akan terus meningkat, dan ketergantungan terhadap pangan impor akan semakin tinggi.

Ketergantungan impor pangan yang tinggi menimbulkan kerentanan yang dapat berimplikasi negative terhadap kedaulatan nasional. Pada tataran rumah tangga, persoalan yang menonjol dalam pemantapan ketahanan pangan adalah masih besarnya proporsi kelompok masyarakat yang mempunyai daya beli rendah, ataupun yang tidak mempunyai akses atas pangan karena berbagai sebab, sehingga mereka mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien. Jika kondisi yang mereka alami ini berkelanjutan, maka bangsa ini akan kehilangan potensi terbaik dari sebagian sumberdaya manusianya. Pada sisi lain, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan fundamental perekonomian yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Dengan pendekatan demikian, perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing yang tinggi. Dalam kaitan ini, pembangunan ekonomi di bidang pangan, baik yang berbasis tanaman, peternakan, perikanan maupun kehutanan, akan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi di bidang pangan ini merupakan prioritas strategis dalam pembangunan nasional.

Memperhatikan permasalahan dan potensi sebagaimana didiskusikan di muka, maka pembangunan ketahanan pangan diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah

hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu; melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Dengan arahan umum tersebut maka kebijakan pembangunan ketahananpangan adalah sebagai berikut.

Pada sisi ketersediaan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air; (b) Menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya dari produksi dalam negeri; (c) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; dan (d) Meningkatkan kapasitas produksi nasional dengan menetapkan lahan abadi untuk produksi pangan.

Pada aspek distribusi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Meningkatkan sarana dan prasarana distribus pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk di dalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efeisien; (b) Mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan daerah yang menghambat distribusi pangan antar daerah; dan (c) Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Dalam hal konsumsi, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) Menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang; (b) Mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan; (c) Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan; dan (d) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu

hamil, balita gizi buruk, dsb)⁴⁴.

a. Faktor-faktor mempengaruhi pangan

- 1) Tersedianya bahan pangan yang cukup untuk keberlanjutan Dalam aspek ketersediaan pangan, masalah utama yang dihadapi adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing nasional. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor teknis dan faktor social ekonomi.

Faktor teknis meliputi :

- a. Penyusutan area lahan pertanian,
- b. Produktifitas pertanian rendah dan tidak meningkat,
- c. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien,
- d. Infrastruktur irigasi yang stagnan, tingginya angka kehilangan produk pada penanganan pascapanen, dan
- e. Kegagalan produksi karena faktor iklim.

Dari aspek sosial ekonomi ialah :

- a. Penyediaan sarana produksi yang belum terjamin,
- b. Kendala peningkatan efisiensi produksi karena laju penurunan luas kepemilikan lahan petani,
- c. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan, (iv) tata niaga produk pangan yang tidak berpihak pada petani,
- d. Terbatasnya devisa untuk impor pangan sebagai alternatif terakhir

Komponen system pangan yang terdiri atas ketersedianya pangan dengan unsur pendukung produksi, distribusi, dan pertukaran, akses pangan dengan unsur pendukung keterjangkauan finansial, alokasi, dan pilihan. Kegunaan

⁴⁴ Dewan Ketahanan Pangan, “Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009”. Jurnal Gizi dan Pangan, vol.1, no.1, (Jul, 2006), 57-63

pangan dengan unsur pendukung nilai nutrisi, nilai social, dan keamanan pangan. Sistem pangan merupakan pilar penyangga ketahanan pangan sehingga keandalan sistem pangan di suatu negara akan menentukan kualitas ketahanan pangan.

Ketahanan pangan menggambarkan suatu capaian keadaan dari system pangan yang bekerja sedemikian rupa sehingga semua manusia kapan pun memiliki kemampuan mengakses pangan baik fisik maupun ekonomi secara berkecukupan, aman, dan bergizi untuk memnuhi kebutuhan makan dan pilihan-pilihan pangan yang diperlukan untuk menompang kehidupan yang sehat. Dengan demikian ketahanan pangan dengan demikian, akan berkurang maknanya apabila sistem pangannya mengalami tekanan. Pengertian ini penting untuk memahami masalah pengembangan teknologi produksi untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan⁴⁵.

2) Mampu membeli alat produksi

Adanya alat produksi pertanian yang di adopsi masyarakat pada prinsipnya berkembang sesuai perkembangan budaya masyarakat, khususnya tingkat keadaran masyarakat petani menerapkan kaidah efisiensi, kualitas, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam proses produksi pertanian. Oleh karena itu, usaha perkembangan teknologi di dalam proses produksi pertanian yang meliputi pengelolaan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat petani untuk menerima teknologi yang baru.

Dinamika perkembangan teknologi produksi di bidang pertanian dipengaruhi banyak faktor. Sejumlah tantangan seperti rendahnya produktivitas, meningkatnya kebutuhan pangan, perlunya menjaga kelestarian lingkungan, keterbatasan inovasi teknologi, dan ancaman produktivitas akibat perubahan iklim ikut memengaruhi corak

⁴⁵ Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015)144-146.

perkembangan teknologi produksi pertanian.

Pada saat ini, kedudukan teknologi produksi pertanian di Indonesia dinilai belum cukup efektif dan efisien dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini tercermin dengan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional, sebagai upaya untuk mengatasi penurunan kapasitas produksi, pemerintah melakukan impor bahan pangan dalam jumlah besar, Pemecahan masalah pengembangan teknologi produksi pertanian agar lebih mampu meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah, petani, peneliti, pengembang teknologi, dan industry teknologi pertanian.

Kerjasama ini diperlukan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan teknologi produksi yang bersifat strategis terhadap berkelanjutan ketahanan pangan. Kajian ini diperlukan sebagai landasan untuk merumuskan pemikiran yang lebih komprehensif dalam menyusun kebijakan. Hal ini penting untuk menjamin berlangsungnya proses inovasi teknologi produksi yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara efisien, efektif, dan berkelanjutan⁴⁶.

3) Faktor faktor yang mempengaruhi nilai jual

a. Waktu kerja usaha tani

Waktu kerja para usaha tani adalah jumlah kerja yang dicurahkan anggota rumah tangga pada usaha tani, waktu kerja dibagi menjadi curahan waktu kerja suami dan curahan waktu kerja istri. Waktu kerja suami pada usaha tani di pengaruhi oleh waktu kerja suami non usaha tani, biaya tenaga kerja luar keluarga, pengeluaran total rumah tangga, umur suami, dan Pendidikan suami. Waktu kerja istri usaha tani di pengaruhi oleh waktu kerja istri non usaha tani, biaya tenaga kerja luar keluarga,

⁴⁶ Bambang Hendro Sunarminto, Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional, 140-141.

pengeluaran, total rumah tangga, dan jumlah anak balita.

b. Biaya waktu produksi

Biaya produksi usaha tani adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja luar keluarga dengan biaya sarana produksi pertanian. Biaya sarana produksi pertanian adalah penjumlahan dari biaya bibit, biaya pupuk, dan biaya peptisida. Biaya tenaga kerja luar keluarga adalah biaya yang digunakan untuk membayar upah tenaga kerja luar keluarga.

c. Produksi

Produksi usaha tani di pengaruhi oleh curahan kerja rumah tangga pada usaha tani, biaya saran produksi, dan luas lahan usaha tani.

d. Pendapatan

Pengeluaran untuk konsumsi pangan, konsumsi non pangan, investasi produksi, dan investasi Pendidikan. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, pengeluaran selain pangan, dan jumlah anggota rumah tangga. Konsumsi nonpangan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, pengeluaran selain non pangan, dan jumlah anggota keluarga. Investasi produksi dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, investasi Pendidikan, dan konsumsi total. Investasi Pendidikan dipengaruhi oleh pendapatan disposibel, konsumsi total, dan jumlah anak sekolah⁴⁷.

Berlaku di Indonesia dan di masyarakat internasional, para penyusun UU Pangan merumuskan batasan ketahanan pangan yang di dalamnya merangkum beberapa butir penting sebagai berikut: (1) Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi Negara sampai tingkat perseorangan; (2) Tolok ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek yaitu: (a) Dari sisi

⁴⁷ Siti Rochaemi dan Erna M Lokollo, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah tangga Petani di Kelurahan Kota Bogor". Jurnal Argo Ekonomi, vol.23, no.2, (oktober 2005), 133-158

kuantitas jumlahnya cukup, (b) Dari sisi kualitas mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi kecukupan gizi, (c) Dari sisi keamanan pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta (d) Dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; dan (3) Penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹⁴ Dalam islam pentingnya penyediaan dan ketahanan pangan dalam kehidupan manusia di tunjukkan dalam Al-Qur'an surah yusuf ayat 47 :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

artinya :

“ Dia (yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ddi tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan ”, (QS, YUSUF:47)⁴⁸.

Adapun tafsiran dari ayat di atas dimana menekankan pada para petani dengan bahasa seperti berikut ini : Kalian harus bercocok tanam dengan sungguh-sungguh selama tujuh tahun berturut-turut. Kemudian hasil panen yang kalian dapatkan setiap tahunnya selama tujuh tahun itu biarkan tetap melekat pada tangkainya agar tidak rusak oleh ngengat. Kecuali sedikit saja yang kalian butuhkan untuk dimakan. Kalian harus bercocok tanam dengan sungguh-sungguh selama

⁴⁸ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012).

tujuh tahun berturut-turut. Kemudian hasil panen yang kalian dapatkan setiap tahunnya selama tujuh tahun itu biarkan tetap melekat pada tangkainya agar tidak rusak oleh ngengat. Kecuali sedikit saja yang kalian butuhkan untuk dimakan.

Ketahanan pangan merupakan isu multidimensi dan sangat kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Aspek politik seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan 6 kebijakan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.

pembangunan dalam perspektif islam adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah. Pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Islam mempunyai beberapa dimensi diantaranya dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi. Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi Islam. Perbedaan cara pandanglah yang memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pemikiran landasan pembangunan konvensional hanya mendasarkan materialistis, sistem nilai dan etika yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan yang di usung oleh kapitalisme dan sosialisme. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan ekonomi semata melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan

sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan sosial.

Selain itu pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat akan terwujud, karena politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi⁴⁹.

Dalam Islam terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban bekerja, antara :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”
(QS. AL-JUMU’AH:10).

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan

⁴⁹ Juliana, “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam”. Jurnal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam, vol.2, no.2, (Jan 2018), 120-131.

duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apalagi yang tampak nyata, sebagaimana firman Allah: Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Tagabun/64: 18) Dengan demikian, tercapailah kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dianjurkan kepada siapa yang telah selesai salat Jumat membaca doa yang biasa dilakukan oleh Arrak bin Malik "Ya Allah! Sesungguhnya aku telah memenuhi panggilan-Mu, dan melaksanakan kewajiban kepada-Mu, dan bertebaran (di muka bumi) sebagaimana Engkau perintahkan kepadaku, maka anugerahkanlah kepadaku karunia-Mu. Engkaulah sebaik-baik Pemberi rezeki." (Riwayat Ibnu Abi hatim)

Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis; carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- M Yusuf S Barusman, Indriati Agustina Gultom, Ahmad Cucus, Appin Purisky Redaputri.(2021). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA). Volume 5, Nomor 4 : 1126-1135
- Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revi). PT Remaja
- Rosdakarya. Muhaimin. Sutiah. Prabowo, S. L. (2009). Manajemen Pendidikan.
- Mulyadi. (2015). Implementasi Kebijakan. In balai pustaka (p. 45). Pengembangan Model SPK. (2019). September.
- Reinata Rhamadanti, Indah Listiana, Dewangga Nikmatullah, Muhammad Ibnu. Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Adopsi Inovasi Petani Pada Program Kartu Petani Berjaya Di Kecamatan Gadingrejo. Journal of Agriculture and Social Development Vol. 2 (1) 2023 | 10-19
- Singarimbun, Masri. Effendi, S. (2017). Metode Penelitian Survai. LP3ES. Sugiyono.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sutrisno, H. (2000). Metode Research 2. Andi Offset.
- Mustari, Nuryanti. Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik) (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015), h.1-2
- Jones, O, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Anderson, James E. 1997. Public Policy-Making. Holt, Rinehart and Winston: New York.
- Wahab. 1998. Analisi Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya. H. 93-94 Agustino, Leo.

Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang : Widya Karya. H. 93-94

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). Bandung : Alfabeta

AG. Subarsono.2005. “ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “ (Konsep, Teori dan Aplikasi), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islamy, M. Irfan. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan. (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2001).

Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber data

Nisaul Hasanah. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Program Kartu Petani Berjaya.

Sumber jurnal

Biblio Buta fika, Dwi Haryono, dan Teguh Endaryanto. Dampak Program Kartu Petani Berjaya terhadap produksi Pendapatan usaha tani padi kabupaten pringsewu

Burhanuddin L. H. & Atha'Iqbal M (2022). Pelaksanaan program percepatan peningkatan tata guna air Irigasi (P3-TGAI) dalam meningkatkan kesejahteraan petani jurnal mentari...., 02(02), 283-296.

Faisal, S. (2002). Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial. Usaha Nasional.

Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling.

Jurnal Fokus Konseling, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a> Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id

(Issue April).

- Haryoko, Sapto. Bahartiar. Arwadi, F. (2020). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, Prosedur Analisis* (Edisi Pert). Badan Penerbit UNM.
- Jamil, Ahmad Syariful. Destiarni, R. P. (2021). Peran Program Magang Jepang Bagi Petani Muda Dalam Meregenerasi Petani Indonesia. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332
- Permataningrum, D. A., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2022). Hubungan Perilaku Petani dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(3), 1192. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.37>
- Poerwandari, K. (2005). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Fakultas Psikologi UI. Sadhily, H. (1991). *Ensiklopedi Indonesia*. PT Ichtiar Baru - Van Hoeve.
- Shodiq, W. M. (2022). Model Cprv (Cost, Productivity, Risk Dan Value-Added) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani Indonesia: a Review. *Jurnal Hexagro*, 6(2), 115–127 <https://doi.org/10.36423/hexagro.v6i2.657>
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224
- Dewan Ketahanan Pangan, “Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006-2009”. *Jurnal Gizi dan Pangan*, vol.1, no.1, (Jul, 2006), 57-63
- Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015)144-146.

Bambang Hendro Sunarminto, *Pertanian Terpadu untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, 140- 141.

Siti Rochaemi dan Erna M Lokollo, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah tangga Petani di Kelurahan Kota Bogor”. *Jurnal Argo Ekonomi*, vol.23, no.2, (oktober 2005), 133-158 Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama R.I, Al-Quran dan

Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012).

Juliana, “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perspektif Politik Ekonomi Islam”. *Jurnal Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Pespektif Ekonomi Islam*, vol.2, no.2, (Jan 2018), 120-131.

Sumber Peraturan-Peraturan

Peraturan gubernur nomor 9 tahun 2020 tentang program kartu petani berjaya

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul 13.00 Wib

Wawancara dengan Hendra Prihatnaka selaku Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, tanggal 31 Maret 2022, pukul

13.00 Wib

Meriyati, (staf kelurahan daya murni) Kondisi Geografis Di Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara peneliti pada hari senin, 20 november 2023.